

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Pustaka.

2.1.1. Partisipasi Politik

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan aktivitas politik. Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang (Mas'ood, 2001:45).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:67).

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela (Pawito, 2009:222). Menurut McClosky dalam

(Budiardjo, 1998:2) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sejalan dengan pendapat McClosky, Surbakti (dalam Rahman, 2002:128) mengartikan “partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan”. Sementara Menurut Budiardjo (2009:367) “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. Selanjutnya dalam sumber lain menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Hikmat 2004:55).

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada

keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik seperti memberikan suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai dampak politik yang baik kedepannya.

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran tersebut sering dijumpai terutama dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik,

karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.

Selain itu para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Akan tetapi, beberapa sarjana yang banyak mempelajari negara-negara komunis dan berbagai negara berkembang cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain. Huntington dan Nelson membedakan partisipasi yaitu bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) atau dikerahkan oleh pihak lain (Budiardjo, 1998:370).

Dari beberapa penjelasan pengertian partisipasi politik di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam proses politik baik itu dalam kegiatan pemilihan maupun kegiatan lain yang erat hubungannya dengan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan politik.

2.1.1.1. Pola dan Bentuk Partisipasi Politik

Piramida pola partisipasi dibedakan menjadi dua. Piramida partisipasi I menurut Milbrath dan Goel dalam Budiardjo, (1998:372) memperlihatkan bahwa masyarakat dibagi dalam tiga kategori yakni

pemain (*gladiators*), penonton (*spectators*), dan apatis (*apathetic*). Pemain (*gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Penonton (*spectators*) termasuk populasi yang aktif secara minimal, termasuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan apatis (*apathetic*) yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Piramida partisipasi politik II, menurut David F Roth dan Frank L. Wilson dalam Budiardjo, (1998:372) melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori yakni aktivis (*activists*), partisipan (*participants*), penonton (*onlookers*), dan apolitis (*apoliticals*). Aktivis (*Activists*) dalam hal ini terdiri atas pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan, the deviant (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris). Sementara partisipan (*participants*) terdiri dari orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Sedangkan penonton (*onlookers*) adalah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobby, pemilih, orang-orang yang terlibat dalam diskusi politik, serta pemerhati dalam pembangunan politik.

Huntington dan Nelson (1990:16-18), menyatakan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak

berbeda-beda, namun kebanyakan riset ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:

Pertama, *Kegiatan pemilihan* mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kedua, *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang yang menyangkut sejumlah besar orang.

Ketiga, *Kegiatan organisasi* menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, *Mencari koneksi (contacting)* merupakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

Sedangkan bentuk partisipasi politik yang terakhir menurut Huntington dan Nelson (1990:16-18) yakni *Tindak kekerasan (violence)* merupakan suatu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Dalam buku Memahami Ilmu Politik, Surbakti (1992:144) Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi politik ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Di pihak lain partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sedangkan partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja.

Sulit untuk disimpulkan bahwa masyarakat tertentu memiliki partisipasi yang tinggi atau rendah, sebab tiap-tiap bentuk partisipasi itu

memiliki latar belakang sebab dan konsekuensi-konsekuensi, serta arah pengembangan yang berbeda-beda. Barangkali dalam kerangka umum saja dapat ditarik pola umum bahwa seseorang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari orang lain. Hal itu berdasarkan aktivitas dan perilaku yang tampak yang dilakukan oleh orang tersebut.

Dengan demikian persoalan partisipasi tidak saja persoalan tinggi rendahnya partisipasi, tetapi juga menyangkut variabel-variabel lain yang mempengaruhi seperti latar belakang munculnya partisipasi ke arah pembangunan, konsekuensi-konsekuensi, dan pola partisipasi itu sendiri.

2.1.1.2. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Surbakti, 1997:144). Menurut Firmanzah, (2007:102) dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih bisa saja merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu.

Menurut Nursal (dalam Efriza, dkk 2006:187) Secara sederhana perilaku pemilih dapat didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih

dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian untuk dapat menjelaskan mengapa orang menjatuhkan pilihannya perlu digunakan pisau analisis yang tepat. Dalam studi politik, lebih khusus teori perilaku pemilih, ada tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam pemilu, yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan pendekatan rasional *choice*.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti, (1997:170) adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional (Asfar, 1996:65). Menurut Surbakti (1997:107) pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (pendidikan dan pekerjaan) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (agama, wilayah, jenis kelamin, umur) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan paling awal dalam melihat hubungan antara calon kandidat dengan masyarakat pemilih. Jadi perilaku pemilih, dalam konteks ini, dihubungkan dengan terpilih atau tidaknya seseorang calon dalam pemilu. Lebih jauh pendekatan ini melihat adanya hubungan yang erat antara perilaku pemilih dengan konteks kemasyarakatan, di mana masyarakat tersebut tinggal.

Pendekatan Psikologis atau lazim disebut dengan mashab Machigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Menurut Asfar (2006:65) sikap seseorang sangat mempengaruhi sikap politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa ada sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politiknya yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai

utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut pertimbangan dan pemikiran yang logis. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Menurut Firmanzah (2007:134) bahwa hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, dari pada faham dan nilai partai atau kontestan. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapat dan lain-lain.

Salah satu teori klasik pendekatan *rational choice* dikemukakan oleh Anthony Downs (1957). Downs dalam deskripsinya mengenai *homo economicus*, mengatakan bahwa pemilih rasional (dalam Roth, 2009:49) hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Walaupun menurut Downs tidak semua orang memiliki sifat egois,

bahkan dalam politik sekalipun. Manusia bertindak egois karena keinginan mengoptimalkan kesejahteraan material mereka. Jika, ini diterapkan pada perilaku pemilih, maka pemilih rasional akan memilih calon yang paling menguntungkan bagi dirinya. Jadi, pemilih bukan berorientasi pada konsep politik sang calon. Downs menamakan perilaku politik ini dengan “*utility maximation*” dan untuk mencapai kebutuhan maksimal tersebut, pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan calon pada masa lalu, dan apa yang mungkin dilakukan pada masa mendatang. Jadi, pemilih harus memiliki informasi yang lengkap.

Selanjutnya untuk menjaga salah pengertian dalam penelitian maka di perlukan adanya suatu penjelasan istilah atau defenisi konsep. Skripsi ini berjudul : **“Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan Pada Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2008”**.

1. Partisipasi politik adalah hak suara masyarakat digunakan dengan baik dan berperan serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal bersama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memilih.
4. Walikota artinya orang dipilih untuk memimpin melalui pemilihan.
5. Langsung artinya dilaksanakan sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain.

2.1.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Dalam Buku Pengantar Sosiologi Politik, (Maran, 2007:156) Frank Linderfeld, menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki keamanan ekonomi.

Sejalan dengan pendapat Frank Linderfeld, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dalam penelitiannya dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. Dengan kata lain tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut.

Dalam konteks mikro, tingkat ekonomi masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Huntington dan Nelson(1990:60) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan sosial dengan partisipasi politik, dan tingkat status sosial ekonomi masyarakat. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar, dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih berpartisipasi daripada mereka yang miskin dan tidak berpendidikan. Selain itu ditegaskan juga oleh Surbakti (1997:144) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi dan keresahan yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi.

Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan status pekerjaan. *Pertama*, pada umumnya penghasilan nampaknya sangat berkaitan dengan partisipasi politik, dan lebih lagi pendidikan. Angka-angka pemungutan suara dalam pemilihan Presiden tahun 1970 di Kolombia merupakan pencerminan yang khas dari efek-efek perbedaan dalam penghasilan (Huntington dan Nelson, 1990:108).

Adapun data partisipasi dalam Pemungutan Suara dan Tingkat Penghasilan dalam Pemilihan Presiden Tahun 1970 di Bogota, Kolombia dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Partisipasi dalam Pemungutan Suara dan Tingkat penghasilan:
Pemilihan Presiden Tahun 1970 di Bogota, Kolombia.

Tingkat sosio-ekonomi barrio	Perkiraan Tingkat Penghasilan (peso/bulan)	Persentase
Atas	Diatas 10.000	85%
Atas-menengah	5.000 – 10.000	94%
Menengah	2.001 – 5.000	76%
Menengah-rendah	1.001 – 2000	67%
Rendah dan Jembel	0 – 1000	59%

Sumber: Michael Browe (dalam Huntington dan Nelson, 1990:110)

Dari hasil survei tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat keterlibatan seseorang dalam berpartisipasi politik. Dalam kaitannya dalam penelitian ini penulis mensinyalir bahwa tingkat penghasilan masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008.

Kedua, pada tingkat status pekerjaan, di Amerika Serikat terdapat korelasi yang sangat erat antara status pekerjaan dan partisipasi dalam pemungutan suara. Di mana menurut survei yang dilakukan oleh Burnham (Huntington dan Nelson, 1990: 121) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam pemungutan suara antara golongan pekerjaan berstatus tinggi pasti

jauh lebih besar dari pada tingkat partisipasi golongan pekerja berstatus rendah. Dalam hal ini para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat keikutsertaannya dalam berpartisipasi politik dibanding dengan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu status pekerjaan juga merupakan hal yang penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008.

Ketiga, pada tingkat pendidikan menurut Huntington dan Nelson (1990:111) di India, data polling dari 1961, 1964 dan 1967 menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai perhatian yang lebih besar dalam politik, lebih sering membahas sosial politik, dan lebih banyak berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah, artinya mereka lebih sering melibatkan diri dalam kegiatan mengadakan kontak atau lobbying. Akan tetapi poll-poll itu juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan, termasuk memberikan suara, menghadiri rapat-rapat politik, dan menyumbang uang dalam kampanye politik. Tingkat-tingkat partisipasi pemilihan yang paling tinggi terdapat dikalangan orang-orang yang buta huruf, lalu orang-orang yang berpendidikan menengah,

sedangkan orang-orang yang berpendidikan tinggi menunjukkan tingkat-tingkat partisipasi yang paling rendah. Di dalam ketiga bentuk kegiatan pemilihan itu, partisipasi orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan orang-orang yang buta huruf.

Beberapa penjelasan dikemukakan. Pertama, untuk memberikan suara diperlukan waktu dan upaya, dan orang-orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat untuk menyediakan waktu dan upaya itu, dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan rendah, yang mungkin menganggap hari pemungutan suara itu sebagai hari pesta. Kedua, tekanan-tekanan kelompok, penyuaapan-penyuaapan dapat menghasilkan banyak partisipasi yang dimobilisasikan di dalam kegiatan-kegiatan pemilihan oleh mereka yang kurang berpendidikan, sementara efeknya tidak sama terhadap mereka yang berpendidikan lebih baik. Akhirnya data-data survei lainnya menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan lebih tinggi lebih merasa terasing dari sistem politik dan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (Huntington dan Nelson, 1990: 112). Dasar inilah yang akan digunakan oleh penulis dalam kaitannya antara tingkat pendidikan dalam mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008.

Berdasarkan uraian dari penjelasan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli ilmuwan politik di atas, maka dalam penelitian ini penulis mensinyalir adanya hubungan atau pengaruh antara

status sosial ekonomi masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008. Dalam penelitian ini, status sosial ekonomi ditinjau dari beberapa indikator yakni tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan status pekerjaan.

2.1.2. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Landasan selanjutnya mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yakni diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1). Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada Langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Sedangkan menurut Agustino (2009:26) mengemukakan bahwa ide dasar dari pemberian otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan Pilkada

secara langsung adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; memelihara stabilitas antara pemerintah pusat dan daerah; serta mengembangkan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan.

Dipilihnya sistem pemilukada secara langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pemilukada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah sehingga menimalisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri (Prihatmoko, 2005:1)

Setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) (2004:52) yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan

oleh partai politik maupun melalui jalur independen. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Pelaksanaan Pilkada telah membawa beberapa harapan baru masyarakat untuk pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Diantaranya adalah : pertama, secara empirik, pilkada langsung memiliki nilai strategis dalam rangka mengurangi kelemahan yang menjadi ciri perpolitikan lokal saat ini. Misalnya arogansi lembaga legislatif yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya representasi rakyat, legitimasi akuntabilitas publik tidak lagi ditentukan oleh DPRD, tetapi oleh rakyat yang memilihnya dan legitimasi kepala daerah semakin kuat.

Kedua, pilkada juga dapat dijadikan sebagai ruang pengelolaan kedaulatan rakyat di samping sebagai instrumen untuk mendorong mekanisme demokrasi bekerja di tingkat lokal. Kini tidak mudah lagi bagi pemerintahan pusat untuk terlibat dalam penentuan kepala daerah karena rakyat yang akan menentukan langsung pemimpinnya. Dengan adanya pilkada, percaturan di arena politik lokal lebih banyak diwarnai permainan dari masing-masing stakeholder yang ada sehingga iramanya lebih kompetitif dan dinamis. Hal ini kemudian menyebabkan aktor-aktor politik yang bermain akan semakin dekat dengan rakyat.

Ketiga, pilkada juga dapat dijadikan alat untuk memperkuat institusi politik lokal. Saat ini baik Kepala Daerah maupun DPRD memiliki basis

politik yang kuat, karena mereka memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Dan keempat, pilkada dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membentuk wadah integritas bersama dalam membangun daerah. Pilkada dapat dijadikan sebagai sebuah konsensus bersama antara calon kepala daerah dan masyarakat untuk memperbaiki ketimpangan dan masalah-masalah yang menghambat kemajuan daerah (Syamsul Hadi Thubany, 2005 : 6-7).

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan terbentuk, apalagi diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 139, dimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk memilih Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota /Wakil Walikota.

2.1.2.1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah suatu sistem yang memiliki paling tidak 3 ciri. Ciri-ciri tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lain (Easton dalam Prihatmoko, 2005:200).

Secara praktis, pemilukada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pelaku utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga pelaku tersebut terlibat langsung dalam

kegiatan-kegiatan seperti pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.

2.1.2.2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dikatakan memenuhi syarat sebagai pilkada langsung karena adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan memberikan peluang kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan (Prihatmoko, 2005:210).

Adapun kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan masa pelaksanaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65 ayat (1). Pada ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada.
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau (UU Nomor 32 Tahun 2004).

2.1.2.3. Kampanye Pilkada

Banyak sekali definisi mengenai Kampanye yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Kotler dan Roberto (1989) dalam Cangara, (2009 :284) “ *Campaign is an organized conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopter), to accept, modify, or abandon certains idea, attitudes practices and behavior.*” (Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Selain definisi di atas, Rogers dan Storey dalam Venus, (2004:7) menjelaskan bahwa kampanye sebagai “ Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Kampanye politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Untuk dapat menyusun sebuah kampanye politik yang baik dan efektif, maka kita harus dapat memahami komunikasi politik terlebih dahulu. Komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap elit politik, karena komunikasi politik menjadi kunci yang utama bagi partai politik maupun kandidat dalam menyampaikan pesan kepada massa maupun pendukungnya.

Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan dan juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu difikirkan oleh setiap kontestan maupun partai politik, karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik (Firmanzah, 2007 :123).

Kampanye politik juga disebut sebagai *political marketing* yang mana menurut Pito, (2006:204) *political marketing* adalah segala cara yang dipakai dalam kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Dimana cara yang digunakan akan membentuk suatu rangkaian makna politik secara otomatis didalam pikiran para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Makna politis inilah yang menjadi output penting *political marketing* yang menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih.

Kampanye merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Untuk itu segala cara mungkin dipakai, diantaranya janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal. Kampanye kerap kali sekadar basa-basi politik. Kampanye yang merupakan bagian dari marketing politikpun dirasa perlu oleh partai-partai politik menjelang pemilu. Setelah pemilu selesai dan kekuasaan diperoleh, mereka melupakan segala janji. Yang penting sudah berkuasa, lalu bertindak semau mereka sendiri.

Ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin kental. Sikap apatis tadi semakin pekat. Orang semakin tak percaya pada politik, sehingga banyak kalangan skeptik yang cukup kritis akhirnya mengambil sikap golput. Menurut masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran elite masyarakat dan tidak merubah apapun kondisi yang ada. Pemilu disosialisasikan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan ketimbang proses dialogis antara kandidat dan pemilih (Firmanzah, 2007:268)

Kampanye sebagai suatu proses 'jangka pendek', dimana semakin kuat anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar menarik perhatian serta dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pendek saja. Cara masyarakat mengevaluasi kandidat juga dipengaruhi oleh kredibilitas dan reputasi politiknya dimasa lalu. Setiap keputusan dan perilaku politik akan terekam dalam memori kolektif masyarakat dan inilah yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kualitas kandidat. Setiap janji dan harapan yang disampaikan selama periode kampanye akan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilu.

Dalam definisi ini, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan partai.

Banyak kalangan yang hanya mengartikan kampanye politik sebagai kampanye pemilu. Pemahaman sempit tentang kampanye politik ini membuat semua partai politik dan kontestan individu memfokuskan diri pada kampanye pemilu belaka (dimana rentang waktunya sangat terbatas). Semua usaha, pendanaan, perhatian dan energi dipusatkan untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih menjelang pemilu. Setelah pemilu usai, aktivitas politik dilupakan. Para kandidat hanya melihat bahwa aktivitas politik adalah aktivitas untuk mencoblos, lalu terjadi pengabaian terhadap keberpihakan serta semangat dalam membantu permasalahan bangsa dan negara pasca pemilu. Padahal masyarakat dalam mengevaluasi kualitas kandidat juga melihat apa saja yang dilakukan dimasa lalu. Pengamatan masyarakat tercurah pada semua aktivitas partai dan kandidat individu, bukannya dipusatkan pada kampanye pemilu saja. Melihat kampanye pemilu sebagai kampanye politik sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

2.2.1. Tesis Marlina Tarigan. (2006) yang berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*" mengungkapkan bahwa kesimpulan dari analisis hubungan variabel dapat dilihat bahwa variabel independen yang pertama adalah popularitas calon. Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa antara variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada terdapat hubungan positif. Selanjutnya, melalui analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada.

Variabel independen yang kedua adalah status sosial ekonomi. Dari hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada. Setelah dilakukan analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada.

Variabel independen yang ketiga adalah kondisi sosial politik. Hasil analisisnya adalah terdapat pengaruh/ hubungan positif antara kondisi sosial politik masyarakat terhadap partisipasi politik dalam

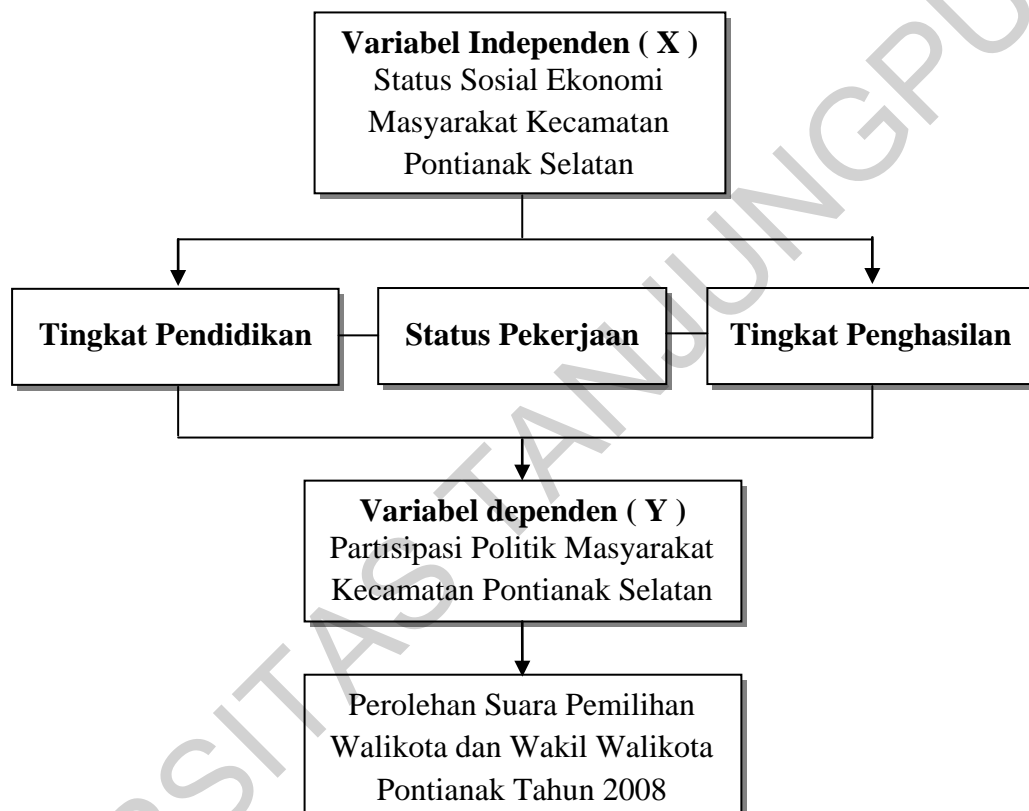
pilkada. Hasil analisis tersebut diperoleh dari hasil analisis tabel silang yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi sosial politik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Begitupula pada hasil analisis korelasi *produk moment* dan uji signifikansi menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada.

2.2.2. Skripsi Novi Hendra, (2008) yang berjudul “*Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang di Kecamatan Pauh Pada Pilkada 2005*” mengungkapkan bahwa hipotesis pertama ditolak, karena terdapat hubungan terbalik antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan taraf kepercayaan 5 %. Berarti temuan pada survey awal yang menyatakan bahwa tingkat status ekonomi seseorang sangat menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat salah. Sedangkan hipotesis kedua diterima, karena t hitung lebih besar dari pada t table hubungan antara tingkat konsumsi media massa dengan tingkat partisipasi politik. Ini juga dibuktikan dengan tingkat kepercayaan 5%. Berarti semakin tinggi tingkat konsumsi media massa tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

Dari beberapa contoh hasil penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan pada uraian di atas pada penelitian ini memang memiliki keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tau tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Akan tetapi dalam penelitian ini objek dan sarannya yang berbeda dan hanya menggunakan satu variabel independen yakni status

sosial-ekonomi sebagai dasar atau konsep untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2008.

2.3. Kerangka Fikir Penelitian



2.4. Hipotesis

Hipotesis itu berarti *stelling*, patokan, pendirian, dalil yang dianggap benar. Juga berarti persangkaan, dugaan yang dianggap benar dan untuk sementara waktu dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga bisa salah (Rianse dan Abdi, 2009:87).

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (Ho) : Tidak ada pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.
- (Ha) : Ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

2.5. Defenisi Konsep/Operasional Variabel

2.5.1. Definisi Konseptual

Status sosial ekonomi adalah sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan, jabatan dalam pekerjaan jenis tempat tinggal dan lain sebagainya, hal ini serupa dengan pendapat (Samuel:1997) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi merupakan posisi yang disandang oleh anggota masyarakat yang berdasarkan tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat penghasilan.

Berdasarkan definisi di atas, status sosial ekonomi adalah ukuran gabungan atau kombinasi total ekonomi dan sosiologis dari pengalaman kerja seseorang dan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap lainnya, berdasarkan pada pendapatan, pendidikan, material yang dimiliki, pekerjaan dan lain sebagainya. Status sosial ekonomi dikaitkan tinggi, sedang, rendah, kaya, miskin kedudukan yang mereka sandang dalam masyarakat.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo:2009).

2.5.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran dari aspek – aspek atau faktor – faktor atau gejala – gejala yang dicakup dalam istilah sebagai petunjuk tentang data yang akan dikumpulkan (Nawawi:2006). Agar terhindar dari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang menjadi poin penting dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Status sosial ekonomi responden merupakan suatu keadaan atau situasi responden yang berhubungan dengan cara mengatur dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator status sosial ekonomi responden meliputi: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan atau penghasilan.
- b) Partisipasi politik responden adalah keterlibatan responden dalam suatu kegiatan pemilihan.

2.6. Indikator Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Menurut (Nawawi:2006) variabel dapat dibedakan menjadi dua yaitu “ variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*deventent variable*)”. Variabel bebas (*independent variable*) sebuah gejala atau faktor yang mempengaruhi munculnya gejala atau faktor lain, yaitu variabel

terikat, sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah sejumlah gejala atau faktor yang muncul atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

2.6.1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tinggi rendahnya status sosial ekonomi responden di Kecamatan Pontianak Selatan yang dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan atau penghasilan responden.

2.6.2. Variabel Terikat

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Aspek variabelnya yaitu tingkat partisipasi responden dalam menggunakan hak suara pada pilkada Pontianak 2008 yang dilihat dari responden yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) dan responden yang mencoblos.